



LAPORAN KINERJA (LKj) 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XII TAHUN 2023



TANJUNGPINANG, JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BPKHTL Wilayah XII atas penggunaan anggaran selama satu tahun.

LKj disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Penyusunan LKj juga dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPKHTL Wilayah XII untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun yang akan datang



Penyusunan LKj juga dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPKHTL Wilayah XII untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun yang akan datang. Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan LKj tahun 2023

Tanjungpinang, Januari 2024

Kepala Balai



Budi Senawan, SP, M.Si

NIP. 19700723 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Profil Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	9
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
B. Rencana Kerja Tahun 2023	15
C. Rencana Kerja dan Anggaran	19
D. Perjanjian Kinerja	21
E. Reviu Atad Dokumen Perencanaan	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	27
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya	34
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024	36
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target DPKTL Tahun 2023	38
A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	40
A.6. Analisis Penggunaan atas Efisiensi Sumber Daya	40
A.7. Analisis Unit Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	41
B. Realisasi Anggaran	45

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023 (Perubahan I)
3. Matriks Renstra BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024
4. Matriks Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023
5. Matriks Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan)

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1	Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan	8
2	Barang Inventaris dan Aset Tetap Lainnya BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023	8
3	Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menjadi Kegiatan BPKHTL Wilayah XII	13
4	Indikator Kegiatan, Indikator Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024	14
5	Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023	16
6	Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023	19
7	Perjanjian Kinerja antara BPKHTL Wilayah XII dengan DPKTL Tahun 2023	22
8	Penyesuaian Target Kinerja dengan Dokumen Anggaran DIPA BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023	25
9	Capaian Target dan Realisasi Kegiatan Berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja dan Renja 2023	27
10	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2020, 2021 dan 2022	34
11	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2023 dan Persentasenya terhadap Renstra BPKH 2020-2024	36
12	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2023 dan Persentasenya terhadap Renja DPKTL 2023	38
13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	40
14	Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Pencapaian Kinerja Tahun 2023	42
15	Realisasi Anggaran DIPA BPKHTL Wilayah XII Tahun Anggaran 2023	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII berubah nomenklatur menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XII. BPKHTL Wilayah XII berkedudukan di Tanjungpinang dengan wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. BPKHTL Wilayah XII sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang dimandatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (DPKTL) sebagai eselon I. Tupoksi yang dikerjakan oleh BPKHTL Wilayah XII mengacu kepada Peraturan Menteri LHK tersebut di atas yaitu melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumberdaya hutan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKHTL Wilayah XII menyelenggarakan fungsi, antara lain (a) pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; (b) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; (c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; (d) penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; (e) pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; (f) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; (g) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; (h) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah

pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; (i) pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (j) fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (k) pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; (l) pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah; (m) pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah dan; (n) pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat advokasi uokum dan pengelolaan data dan informasi.

Sebagai pertanggungjawaban BPKHTL Wilayah XII kepada pemberi mandat atas kinerja yang dicapai berdasarkan anggaran yang diterima, BPKHTL Wilayah XII menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj tersebut adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. Tujuan

Penyusunan LKj bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPKHTL Wilayah XII untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Struktur Organisasi

Kedudukan BPKHTL Wilayah XII berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan dipimpin oleh Kepala

Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah XII memiliki 3 (tiga) Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- advokasi hukum; dan
- pengelolaan data dan informasi

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan

Mempunyai tugas :

- melaksanakan penyiapan bahan penataan batas; rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan;
- inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional yang terdapat di BPKHTL Wilayah XII terdiri dari :

- Pejabat Fungsional Pengendali Eksositem Hutan (PEH);

3. Seksi Sumberdaya Hutan dan Tata Lingkungan

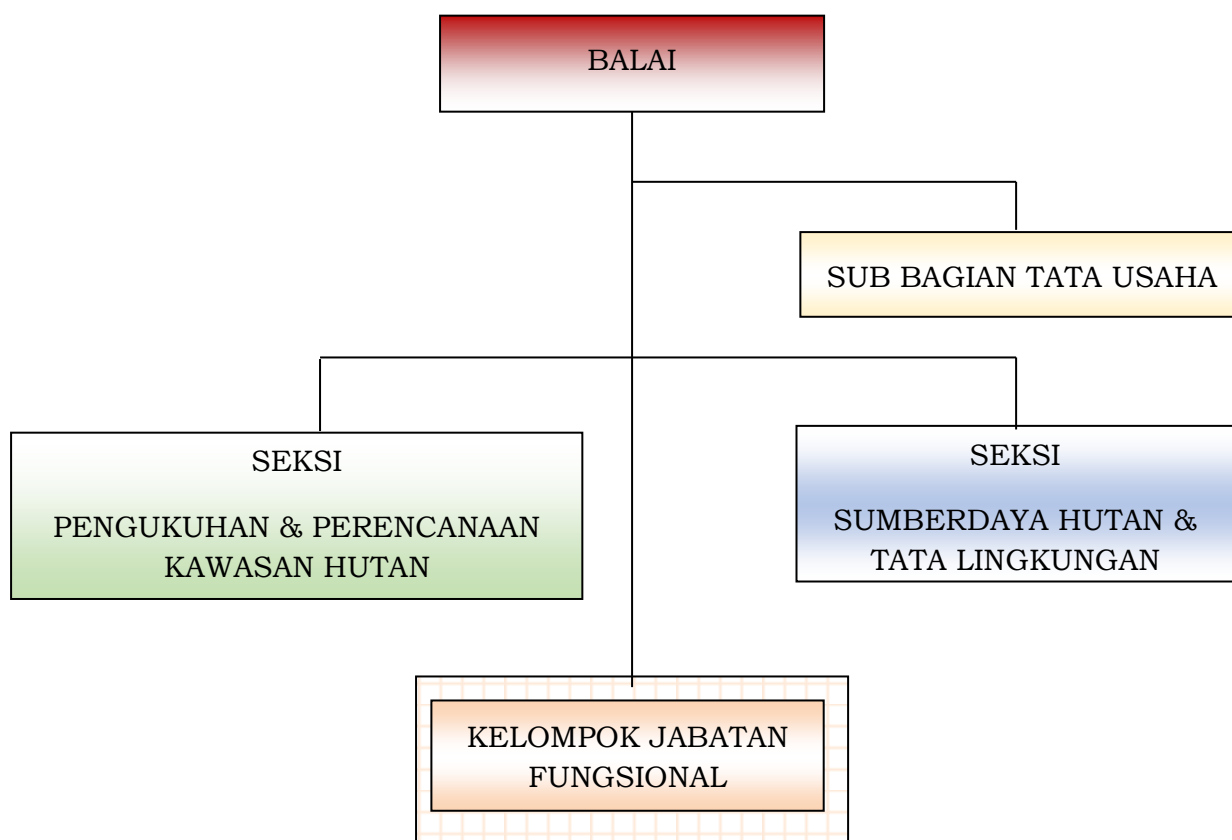
Mempunyai tugas :

- melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, dana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan
- forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah; serta

- Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL);
- Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan (SURTA);
- Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN;
- Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN;

- tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah

Selanjutnya fungsi-fungsi tersebut terstruktur dalam tata hubungan kerja sebagaimana Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII sebagaimana pada Gambar 1.

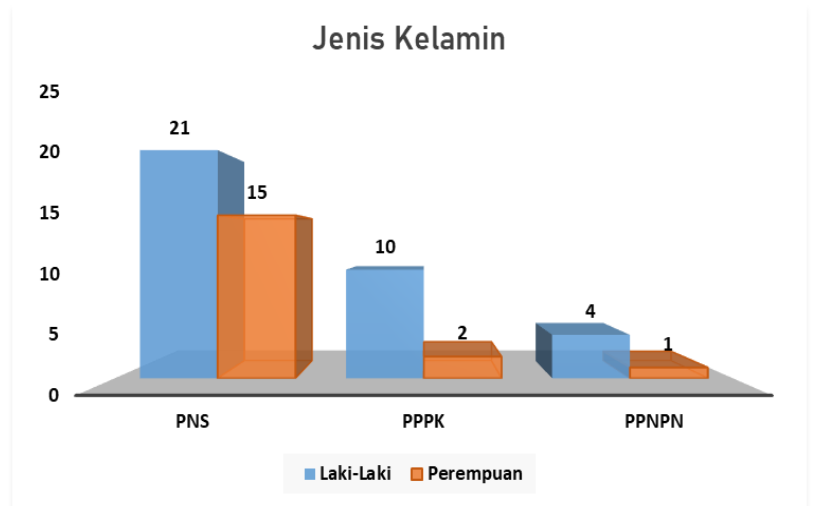
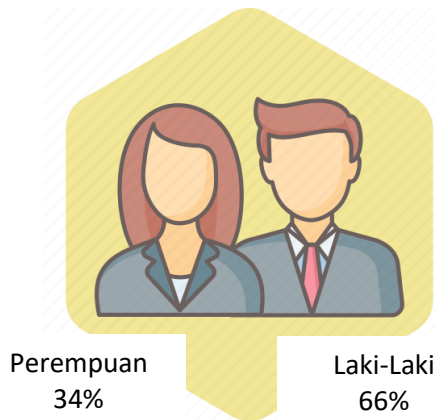


Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XII

D. Profil Sumber Daya Manusia

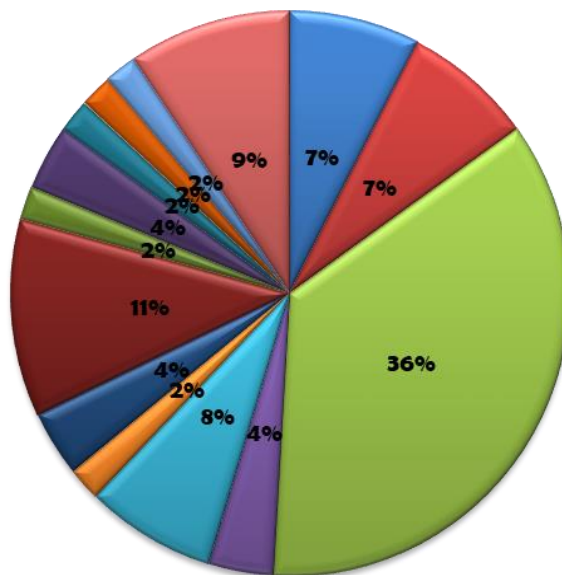
Pegawai pada BPKHTL Wilayah XII pada tahun 2023 memiliki personil sejumlah 53 orang yang terdiri dari 36 PNS; 12 PPPK; dan 5 PPNPN. Berdasarkan jumlah keseluruhan pegawai terdapat 35 orang pegawai laki-laki (66%) dan sisanya merupakan pegawai perempuan sebanyak 18 orang (34%). Berdasarkan jabatan kepegawaian di BPKHT Wilayah XII didominasi oleh jabatan fungsional PEH sebesar

36% (19 Orang) untuk PNS dan 9% (4 orang) untuk PPPK. Sedangkan untuk tingkat pendidikan di dominasi lulusan Diploma III sebanyak 14 orang untuk PNS dan SMK Kehutanan sebanyak 5 orang untuk PPPK.

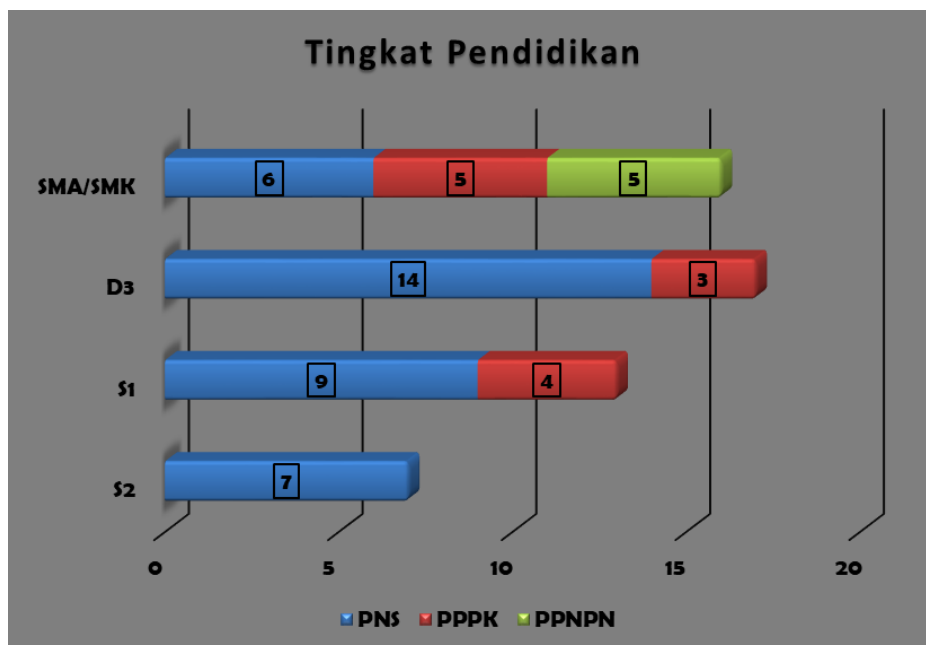


PNS : 36 Orang
 PPPK : 12 Orang
 PPNPN : 5 Orang
 Jumlah : 53 Orang

Jabatan



- Pejabat Struktural
- Jabatan Fungsional Umum (PNS)
- Jabatan Fungsional PEH (PNS)
- Jabatan Fungsional PEDAL (PNS)
- Jabatan Fungsional SURTA (PNS)
- Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (PNS)
- Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PNS)
- Jabatan Fungsional PEH (PPPK)
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer (PPPK)
- Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Aparatur (PPPK)
- Jabatan Fungsional Arsiparis (PPPK)
- Jabatan Fungsional Analisis Hukum (PPPK)
- Jabatan Fungsional Analisis Hukum (PPPK)
- Jabatan Fungsional Analisis Hukum (PPPK)
- PPNPN



Pada tahun 2023 terdapat perubahan komposisi dan formasi pegawai di BPKHTL Wilayah XII mulai dari pengisian dan mutasi jabatan pengawas eselon IV, perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan fungsional, optimalisasi PPPK Teknis, dan seleksi pengadaan PPPK Teknis dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Pegawai BPKHTL	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Struktural (2 Orang) • Pejabat Fungsional PEH (19 Orang) • Pejabat Fungsional PEDAL (2 Orang) • Pejabat Fungsional SURTA (4 Orang) • Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN (1 Orang) • Jabatan Fungsional Umum (6 Orang) 	34 Orang
2.	Penambahan Pegawai	Petikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.141/MENLHK/SERJEN/PEG.2/2/2023 tanggal 15 Februari 2023, terdapat pengisian dan mutasi jabatan Pengawas Eselon IV untuk menduduki : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Jabatan Kepala Seksi Penguukhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 	2 Orang
3.	Perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan fungsional	Melalui Uji Kompetensi Teknis yang yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 14 Desember 2023 di Kantor BPKHTL Wilayah XII sebanyak 2 orang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpindahan jabatan dari Bendahara dengan jenjang yang dituju Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN 	-

		<p>2. Perpindahan jabatan dari Analis Tata Usaha dengan jenjang yang dituju Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN</p> <p>Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :S-214/PB/2023 tanggal 27 Desember 2023 Hal Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2023</p>	
4.	Penambahan Pegawai	Melalui seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Teknis KLHK Formasi Tahun 2022 (Pengumuman Hasil Optimalisasi PPPK Nomor : PG.3/SETJEN/ROPEG/PEG.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	2 Orang
5.	Hasil Optimalisasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Melalui seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Teknis Kementerian LHK Formasi Tahun 2022 (Pengumuman Hasil Optimalisasi PPPK Nomor : PG.10/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.0/09/2023 tanggal 22 September 2023) untuk jabatan Pranata Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama	1 Orang
4.	Perpindahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	<p>Melalui seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Teknis Kementerian LHK Formasi Tahun 2022 untuk Jabatan Fungsional PEH (Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PPPK Nomor : PG.20/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.0/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Fungsional PEH Ahli Pertama (1 Orang) • Jabatan Fungsional PEH Pemula (3 Orang) • Jabatan Fungsional PEDAL Ahli Pertama (1 Orang) • Fungsional Analis Hukum (1 Orang) • Fungsional Pranata Sumber Daya Aparatur Terampil (1 Orang) • Fungsional Pranata Komputer (1 Orang) • Fungsional Arsiparis (1 Orang) 	9 Orang
6.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	PPNPN melalui penandatanganan kontrak kerja dengan Kepala Balai	5 Orang

Sebanyak 53 pegawai yang berada di BPKHTL Wilayah XII ditempatkan sesuai kebutuhan pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan. Untuk melihat lebih rinci sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan pada masing-masing seksi dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

No.	Bagian/Seksi	Tingkat Pendidikan					Jumlah	Tingkat Golongan			Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA /SMK		IV	III	II	
1.	Tata Usaha										
	ASN	-	2	1	3	-	6	1	4	1	6
	PPPK	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-
	PPNPN	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
2.	Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan										
	ASN	-	1	4	4	5	14	-	8	6	14
	PPPK	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-
	PPNPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan										
	ASN	-	4	4	7	1	16	1	11	4	16
	PPPK	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-
	PPNPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	7	14	17	15	53	2	23	11	36

Sumber : Laporan Kepegawaian BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023

Sedangkan sarana dan prasarana Barang Milik Negara (barang inventaris dan aset tetap lainnya) yang dimiliki BPKHTL Wilayah XII guna mencapai kinerja kegiatan tahun 2023 bernilai Rp 17.228.198.521,- (Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Barang Inventaris dan Aset Tetap Lainnya BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023

No.	Kelompok Barang	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	M2	8.049	3.511.675.000
2.	Peralatan dan Mesin	Unit/Buah	680	10.191.565.521
3.	Gedung dan Bangunan	Unit	8	3.471.548.000
4.	Aset Tetap Lainnya	Buah	202	21.410.000
5.	Software	Buah	1	32.000.000
	Jumlah			17.228.198.521

Sumber : Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Saldo Per Desember 2023

E. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tujuan utama pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2020-2024 adalah terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pemantapan kawasan hutan : Mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Penataan lingkungan hidup : Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (3) Partisipatif dan Keberlanjutan : pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Aspek strategis organisasi BPKHTL Wilayah XII untuk mendorong pencapaian tujuan utama pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah penyiapan pemantapan kawasan hutan untuk menetapkan kawasan hutan agar diakui secara legal dan aktual. Dalam hal ini, BPKHTL Wilayah XII akan menyediakan bahan untuk penetapan kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan. Proses penetapan kawasan hutan yang diawali oleh penataan batas kawasan hutan setelah proses penunjukan kawasan hutan adalah tugas pokok utama BPKHTL Wilayah XII, di samping penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, dan meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang ditengarai dapat menggagalkan pemenuhan hasil tata batas kawasan hutan untuk proses penetapan kawasan hutan, antara lain: (1) karakteristik sumberdaya hutan negara yang akan dikukuhkan merupakan sumberdaya milik umum (*common pool resources*), sehingga BPKHTL Wilayah XII mengalami kesulitan untuk melakukan tata batas; (2) kelompok hutan yang akan ditata batas terpencar di pulau-pulau dan luasannya kecil-kecil; dan (3) pendanaan yang tidak konsisten akibat kebijakan yang selalu berubah-ubah termasuk pemotongan anggaran. Beberapa hal tersebut akan berdampak krusial pada kualitas kinerja yang disampaikan dalam LKj ini. Kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang ditengarai dapat mengatasi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut, dan di sisi lain dapat meningkatkan kinerja BPKHTL Wilayah XII adalah komitmen pemerintah untuk mendanai kegiatan prioritas pembangunan bidang keplanologian kehutanan, tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan ahli di bidangnya serta sarana dan prasarana pengukuran yang memadai.

F. Sistematika Penyajian

Penyajian LKj BPKHTL Wilayah XII berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, sistematika penyajian LKj BPKH Wilayah XII Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi BPKHTL Wilayah XII Tanjungpinang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja BPKHTL Wilayah XII untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Sub bab ini juga akan menyajikan hasil analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis. Sub bab ini akan terdiri dari sub-sub bab yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra BPKHTL Wilayah XII;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar DPKTL;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis Rincian Output yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini akan menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BPKHTL Wilayah XII sesuai dengan dokumen Pernyataan Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab ini akan menyimpulkan secara umum pencapaian kinerja BPKHTL Wilayah XII serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lampiran lainnya

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam dokumen Renstra 2020-2024 [Perubahan] ditetapkan kriteria evaluasi sebagai ukuran keberhasilan peningkatan kinerja BPKH Wilayah XII pada akhir tahun 2024, yaitu : (1) terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau; (2) terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (3) tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumberdaya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL; (4) tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan di wilayah kerja BPKHTL; (5) tersedia data dan informasi pelaksanaan hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL; (6) meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor; (7) tersedianya data dan informasi verifikasi lapangan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif; (8) meningkatnya kajian layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan; dan (9) Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah A (83 poin). Dengan demikian, *outcomes* yang diharapkan pada akhir tahun 2024 adalah : (1) dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan seluas 277.726 Ha (2.940 Km) di Provinsi Kepulauan Riau (penetapan kawasan hutan 100%); (2) dokumen Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan untu TORA seluas 13.296 Ha; (3) data dan informasi sumberdaya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional yang *valid* dan *up to date* di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 35 klaster Enumerasi TSP/PSP; (4) data dan informasi penutupan lahan terkini di Provinsi Kepulauan Riau untuk update data tutupan lahan tingkat nasional; (5) data dan informasi hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 Badan Usaha; (6) dokumen layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor sebanyak 3 layanan; (7) dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 Dokumen; (8) dokumen layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan sebanyak 3 layanan; dan (9) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, nilai SAKIP adalah 83 Poin (A).

Sepanjang tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah XII akan melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan, penguatan dan penatagunaan kawasan hutan,

inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, perencanaan penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan didukung oleh kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari sasaran program DPKTL dan sasaran strategis KLHK. Tabel 3 menunjukkan keterkaitan sasaran program dan indikator DPKTL, serta sasaran strategis dan indikator strategis KLHK.

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menjadi Kegiatan BPKHTL Wilayah XII

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program PKTL	Indikator Kinerja Program
Kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate	Luas kawasan hutan dengan status penetapan	Seluruh kawasan hutan diakui sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)
Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan	Laju deforestasi	Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan
Penerimaan Negara dari lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh	Nilai PNBPFungsional KLHK	Optimalisasi sumbangan PNBPF dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh Penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi	Meningkatkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL dengan target kumulatif 83 poin

Sumber: Renstra BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024

Berdasarkan sasaran strategis KLHK dan sasaran program Ditjen PTKL, pada Tabel 4 disajikan kegiatan dan Rincian Output serta komponen kegiatan yang akan dikerjakan oleh BPKHTL Wilayah XII tahun 2020-2024.

Tabel 4. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH, 3 layanan	Fasilitasi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH
	Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif, 1 Dokumen	Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH, 3 layanan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikanya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga seluas 277.726 Ha (2.940 Km)	Penyiapan trayek batas kawasan hutan
			Pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan seluas 13.296 Ha	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
			Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumberdaya hutan	Data dan informasi sumberdaya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH terlayani sebanyak 35 klaster	Enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi PSP
	Tersedia dan termutakhirnya data penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di Provinsi Kepulauan Riau	Cek lapangan data penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat
Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedia data dan informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH sebanyak 5 Badan Usaha	Verifikasi Pembayaran PNBK penggunaan kawasan hutan
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKH Wilayah XII	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif fan efisien lingkup Direktorat Jenderal PKTL	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan • Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 	Layanan umum : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi • Pengelolaan kepegawaian

		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan • Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan <p>Layanan Perkantoran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan tunjangan • Operasional dan pemeliharaan kantor <p>Layanan Sarana dan Prasarana Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana internal • Perlatan fasilitas perkantoran
--	--	--	--

Sumber: Renstra BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024 (Perubahan)

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2020-2024 yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rincian Output kegiatan yang tertera dalam Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra 2020-2024. *Outcomes* yang diharapkan pada tahun 2023 adalah : (1) kebijakan bidang lingkungan hidup penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan; (2) panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan; (3) tersedia data dan informasi sumberdaya hutan yang *valid* dan *up to date* sebanyak 1 Klaster Enumerasi TSP/PSP; (4) tersedia data dan informasi penutupan lahan untuk update data penutupan lahan tingkat nasional di 1 Provinsi Kepulauan Riau; dan (5) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPKHTL Wilayah XII sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Pada bulan Januari 2023 melalui surat Menteri Keuangan Nomor : S-748/MK.02/2022 tanggal 12 September 2022 telah memberikan persetujuan penggunaan dana PNBPKH tahun 2023 paling tinggi 26%, sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendapatkan alokasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) PNBPKH. Dengan adanya ABT PNBPKH mengubah target kinerja tahun 2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian Renja tahun 2023 (Perubahan). Dengan demikian *outcomes* yang Renja Tahun 2023 (Perubahan) adalah : (1) terlaksananya fasilitasi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH sebanyak 1 layanan; (2) tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa

lingkungan tinggi secara pasrtisipatif sebanyak 1 dokumen; (3) terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH sebanyak 1 layanan; (4) tersedia data dan informasi sumberdaya hutan yang *valid* dan *up to date* sebanyak 2 Klaster Enumerasi TSP/PSP; (5) tersedia data dan informasi penutupan lahan untuk update data penutupan lahan tingkat nasional di 1 Provinsi Kepulauan Riau; (6) tersedia data dan informasi hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 1 Badan Usaha; dan (7) panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga sepanjang 1.900 Km; (8) dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan Berita Acara tata Batas Objek TORA sebanyak 1 Provinsi; (9) meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui layanan umum sebanyak 1 layanan; (10) meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui layanan perkantoran sebanyak 1 layanan serta; (11) terlaksananya layanan sarana dan prasarana internal sebanyak 83 unit. Sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 sesuai dengan dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahannya akan disajikan secara rinci sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target 2023
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Fasilitasi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan
	Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Verifikasi lapangan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	1 Dokumen
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH, 3 layanan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikanya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Penyiapan trayek batas kawasan hutan Pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga	1.900 Km

			Pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan	
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumberdaya hutan	Data dan informasi sumberdaya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH terlayani	Enumerasi TSP/PSP	2 Klaster
	Tersedia dan termutakhirnya data penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di Provinsi Kepulauan Riau	Cek lapangan data penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat	1 Provinsi
Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedia data dan informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	Verifikasi Pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan	1 Badan Usaha
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKH Wilayah XII	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal PKTL	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL (82 poin) • Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (3 level) • Laporan Keuangan Ditjen PKTL 	Layanan umum :	1 Layanan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi • Pengelolaan kepegawaian • Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan • Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 	
			Layanan Perkantoran :	1 Layanan
			<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan tunjangan • Operasional dan pemeliharaan kantor 	
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal :	83 Unit
			<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana internal • Perlatan fasilitas perkantoran 	

Sumber: Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan)

Tabel 5 menunjukkan kegiatan pencegahan dampak lingkungan dengan komponen kegiatan fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan

wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 layanan; dan verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif sebanyak 1 dokumen mendorong pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di unit Eselon II (Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor) sedangkan komponen kegiatan fasilitasi layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL mendorong pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan (Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan). Pencapaian kedua RO tersebut mendorong pencapaian sasaran program Ditjen PKTL yaitu meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

Kegiatan panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga sepanjang 1.900 Km melalui dengan penyiapan trayek batas kawasan hutan, pemancangan batas sementara kawasan hutan dan identifikasi hak-hak pihak ketiga serta pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan akan mendorong pencapaian sasaran kegiatan terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan (penetapan 100%) Eselon II (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) serta mendorong pencapaian sasaran program Ditjen PKTL yaitu seluruh kawasan hutan diakui sebagai hutan tetap. Sedangkan komponen kegiatan inventarisasi, verifikasi dan Berita Acara Tata Batas objek TORA sebanyak 1 Provinsi akan mendorong pencapaian sasaran kegiatan terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA di Unit Eselon II (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) serta mendorong pencapaian sasaran program Ditjen PKTL yaitu penyelesaian kawasan hutan untuk TORA.

Kemudian komponen kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan melalui Enumerasi TSP/PSP sebanyak 2 klaster dan data dan informasi penutupan lahan yang *up to date* di Provinsi Kepulauan Riau akan mendorong pencapaian sasaran kegiatan tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumber daya hutan dan penutupan lahan di unit Eselon II (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan) serta mendorong pencapaian sasaran program Ditjen PKTL yaitu meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan. Sedangkan komponen kegiatan verifikasi pembayaran PNBK Penggunaan kawasan hutan sebanyak 1 Badan Usaha akan

mendorong tersedia data dan informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di unit Eselon II (Direktorat Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan) serta mendorong pencapaian sasaran program DPKTL yaitu Optimalisasi sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Untuk mendorong pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal PKTL pada unit Eselon II (Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), BPKHTL Wilayah XII akan mewujudkannya melalui kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan komponen kegiatan layanan umum sebanyak 1 layanan, layanan perkantoran sebanyak 1 layanan dan layanan sarana prasarana internal sebanyak 83 unit.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah XII telah menyusun 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 11 (sebelas) komponen kegiatan yaitu (1) fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL; (2) verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif; (3) fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan; (4) dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA; (5) panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; (6) data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL; (7) data dan informasi penutupan lahan di wilayah kerja BPKHTL; (8) hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL; (9) layanan umum; (10) layanan perkantoran; dan (11) layanan sarana dan prasarana internal dengan anggaran sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL XII Tahun 2023

<i>Kegiatan</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Komponen/Sub Komponen</i>	<i>Volume</i>	<i>Jumlah Biaya</i>
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000
		Fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor		50.000.000

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Komponen/Sub Komponen	Volume	Jumlah Biaya
	Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	1 Dokumen	269.000.000
		Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif		269.000.000
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan	1 Layanan	50.000.000
		Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan		50.000.000
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi	75.000.000
		Dukungan pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan		
	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.900 Km	17.332.033.000
		Penataan batas kawasan hutan		17.332.033.000
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumberdaya hutan	Inventarisasi Hutan Nasional	2 Klaster	145.605.000
		Enumerasi TSP/PSP		145.605.000
	Tersedia dan termutakhirnya data penutupan lahan	Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Layanan	97.298.000
		Cek lapangan data penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat		97.298.000
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedia data dan informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	1 Badan Usaha	80.000.000
		Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan		80.000.000
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	6.334.280.000

<i>Kegiatan</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Komponen/Sub Komponen</i>	<i>Volume</i>	<i>Jumlah Biaya</i>
		a. Layanan Umum	1 Layanan	1.073.900.000
		b. Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.260.380.000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	83 Unit	1.898.800.000
		Layanan Sarana Internal	83 Unit	1.898.800.000

Sumber: Rincian Kertas Kerja BPKHTL Wilayah XII T.A 2023

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

BPKHTL Wilayah XII selaku penerima amanah dan kesepakatan, akan mempertanggungjawabkan hasil penugasan itu kepada DPKTL selaku pemberi amanah dan kesepakatan. Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara DPKTL dengan BPKH Wilayah XII dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini. Perjanjian kinerja tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PKTL Nomor: SK.1/PKTL/SET.2/KEU.0/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pada bulan September tahun 2023 dilakukan revisi atau penyesuaian Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PKTL Nomor: SK.28/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan [Perubahan I].

Tabel 7. Perjanjian Kinerja antara BPKHTL Wilayah XII dengan DPKTL Tahun 2023

<i>Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>Target Sesuai Perdirjen PKTL</i>	<i>Target Sesuai Perdirjen PKTL (Perubahan I)</i>
I. Meningkatkan upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan			
A. Pencegahan Dampak Lingkungan			
1. Kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	-
2. Meningkatkan Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	-	
3. Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	-	1 Dokumen
4. Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	-	1 Layanan
II. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA			
B. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
1. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	-	1 Provinsi
III. Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap			
1. Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan	1.900 Km
IV. Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan			
C. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
1. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	2 Klaster
2. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan
V. Meningkatkan sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan			
D. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	-	1 Badan Usaha

Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Sesuai Perdirjen PKTL	Target Sesuai Perdirjen PKTL (Perubahan I)
VI. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK			
E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
1. Meningkatkan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL • Level Maturitas Ditjen PKTL • Laporan Keuangan Ditjen PKTL 		
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	83 Unit

Sumber : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PKTL Nomor : SK.1/PKTL/SET.2/KEU.0/1/2023 tgl 10 Januari 2023
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PKTL Nomor: SK.28/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2023 tgl 27 September 2023

Perjanjian kinerja seperti ditunjukkan pada Tabel 7 merupakan penjabaran dari Renja 2023, perjanjian kerja tersebut akan dijelaskan pada bagian capaian kinerja BPKHTL Wilayah XII (Bab III Akuntabilitas Kinerja).

E. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai *outcomes* sebagaimana dalam dokumen Renja 2023 dan Perubahannya, BPKHTL Wilayah XII memperoleh alokasi anggaran dengan beberapa kali perubahan yaitu :

1. Pagu awal	Sesuai dengan pengesahan DIPA T.A 2023 Nomor : 029.06.2-439649/2023 tanggal 30 November 2022, anggaran BPKHTL Wilayah XII sebesar Rp. 26.551.618.000,-
2. Penambahan pagu anggaran	Revisi dilakukan pada bulan Januari 2023 dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA dengan sumber dana PNBPKH. Melalui surat Nomor : S-748/ MK.02/2022 tanggal 12 September 2022 Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan penggunaan dana PNBPKH tahun 2023 untuk Ditjen PKTL sebagai unit Eselon I penghasil PNBPKH. BPKHTL Wilayah XII mendapatkan alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) PNBPKH sebesar Rp. 12.622.700.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 39.174.318.000,-
3. Penghapusan catatan halaman IV.A Blokir DIPA satker lingkup Ditjen PKTL T.A 2023	Pada bulan Februari 2023 telah tercapai kesepakatan dalam Trilateral Meeting bersama mitra Direktorat Lingkungan Hidup PPN/Bappenas terkait distribusi pagu program kualitas lingkungan hidup yang terblokir. Pagu terblokir BPKHTL Wilayah XII dengan komponen kegiatan pengembangan NSPK penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional adalah sebesar Rp. 369.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penyesuaian data

	<p>melalui aplikasi SAKTI dengan mengacu pada arsitektur kinerja, sehingga komponen kegiatan tersebut berubah menjadi 3 komponen kegiatan fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor (Rp. 50.000.000); fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan (Rp. 50.000.000); serta verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif (Rp. 269.000.000)</p>
<p>4. Distribusi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran</p>	<p>Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan hutan 100% dan kegiatan Prioritas Nasional (PN) lainnya dilakukan distribusi pemenuhan kebutuhan anggaran penyelesaian kegiatan PN untuk satker BPKHTL yang menyampaikan usulan kebutuhan anggaran dengan satker BPKHTL yang telah melakukan pencermatan terhadap potensi sisa anggaran melalui surat Sekteraris Ditjen PKTL Nomor : S.677/SET.2/PEHKT/KEU.0/7/2023 tanggal 3 Juli 2023. Setelah dilakukan pencermatan potensi sisa anggaran di BPKHTL Wilayah XII sebesar Rp. 1.200.330.000,- sehingga pagu menjadi Rp. 37.973.988.000,-</p>
<p>5. Realokasi Anggaran Kegiatan Prioritas Tahap II</p>	<p>Revisi dilakukan pada bulan September 2023 dalam rangka pergeseran anggaran belanja dalam RO Prioritas Nasional antar satker tahap II untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti (Pertikawan) Regional Tahun 2023. Realokasi anggaran BPKHTL Wilayah XII untuk kegiatan Pertikawan sebesar Rp. 495.944.000,- dengan rincian Rp. 285.944.000 dari sumber dana Rupiah Murni dan Rp. 210.000.000 dari PNB</p>
<p>6. Pergeseran Anggaran Antar Satker dari Belanja Pegawai ke Belanja Operasional</p>	<p>Revisi dilakukan pada bulan November 2023 dalam rangka persiapan anggaran kenaikan tunjangan kinerja 80% serta untuk pemenuhan kebutuhan belanja barang operasional di beberapa satker lingkup Ditjen PKTL. BPKHTL Wilayah XII mengalokasikan pergeseran anggaran dari belanja pegawai ke belanja operasional sebesar Rp. 160.965.000 dan pergeseran dari belanja pegawai untuk antar satker sebesar Rp. 450.222.000,-</p>
<p>7. Realokasi anggaran Blokir Automatic Adjustment T.A 2023</p>	<p>Revisi dilakukan pada bulan Desember 2023 dalam rangka realokasi anggaran blokir <i>Automatic Adjustment</i> Lingkup Ditjen PKTL DIPA T.A 2023 pada belanja pegawai dan belanja non pegawai (RO 5433.PBV.002 Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan). Anggaran blokir <i>Automatic Adjustment</i> /pengurangan DIPA BPKHTL Wilayah XII sebesar Rp. 695.806.000 dari belanja pegawai dan Rp. 10.000.000.000,- dari belanja non pegawai.</p>

Sesuai dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran [DIPA] Nomor : 029.06.2-439649/2023 tanggal 30 November 2022, BPKHTL Wilayah XII mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 26.551.618.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Pada tahun 2023 DIPA BPKHTL Wilayah XII mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan perubahan program dan kegiatan, penambahan pagu anggaran PNPB PKH, distribusi dan pergeseran anggaran belanja antar satker, realokasi anggaran realokasi anggaran untuk kegiatan PN dan realokasi blokir *Automatic Adjustment* sehingga DIPA terakhir BPKHTL Wilayah XII adalah sebesar Rp. 26.332.016.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah). Dengan adanya perubahan anggaran tersebut perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dengan dokumen anggaran BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023.

Tabel 8. Penyesuaian Target Kinerja dengan Dokumen Anggaran DIPA BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Dalam Renja		Penyesuaian Target Renja (Perubahan)	
		Target	Rp.	Target	Rp.
I. Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
A. Pencegahan Dampak Lingkungan					
1. Kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	369.000.000	-	-
2. Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	-	-	1 Layanan	50.000.000
3. Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	-	-	1 Dokumen	269.000.000
4. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	-	-	1 Layanan	50.000.000
II. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
B. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					

Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Dalam Renja		Penyesuaian Target Renja (Perubahan)	
		Target	Rp.	Target	Rp.
1. Terelesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	-	-	1 Provinsi	75.000.000
III. Terelesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
1. Terelesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	1 <i>Rekomendasi Kebijakan</i>	19.028.307.000	1.900 Km	17.332.033.000
IV. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan					
C. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan					
1. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	75.605.000	2 Klaster	145.605.000
2. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	97.298.000	1 Layanan	97.298.000
V. Meningkatnya sumbangan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan					
D. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	-	-	1 Badan Usaha	80.000.000
VI. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
1. Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL (82 poin) • Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (3 level) • Laporan Keuangan Ditjen PKTL 				
	Layanan Umum	1 Layanan	575.000.000	1 Layanan	1.073.900.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.406.408.000	1 Layanan	5.260.380.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	83 Unit	1.898.800.000

Sumber : Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023
: Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan)

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan dan unit kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 disajikan berdasarkan perjanjian kinerja, sasaran kegiatan serta indikator kegiatan seperti tercantum dalam Renja 2023. Tabel 9 menunjukkan capaian target dan realisasi kegiatan, yang disandingkan dengan sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 9. Capaian Target dan Realisasi Kegiatan Berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja dan Renja 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Perjanjian Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Capaian		
Pencegahan dampak lingkungan	Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
Pencegahan dampak lingkungan	Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Target Tercapai
Pencegahan dampak lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	1 Provinsi	1 Provinsi	100,00	Target Tercapai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Perjanjian Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Capaian		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	1.900 Km	1.919,14 Km	101,01	Target Tercapai
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	2 Klaster	2 Klaster	100,00	Target Tercapai
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100,00	Target Tercapai
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PKTL	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL (82 poin) • Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (3 level) • Laporan Keuangan Ditjen PKTL 	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	83 Unit	83 Unit	100,00	Target Tercapai

Sumber : Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan)
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dit PKTL (Perubahan I)

Berdasarkan Tabel 9, capaian kinerja pada 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) komponen kegiatan terealisasi sebesar 100% atau target tercapai, dengan masing-masing penjelasan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan dampak lingkungan

Sebagaimana dalam Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P.3/PKTL/SET.2/OTL/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, tahun 2023 merupakan tahun kedua BPKHTL Wilayah XII melaksanakan kegiatan bidang tata lingkungan untuk mendukung Direktorat

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

- (1) Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL. Untuk mencapai output terlaksananya fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XII sebanyak 1 layanan, dengan anggaran yang tersedia kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk mengikuti Rapat Penguatan Peran BPKHTL dalam Pelaksanaan Tugas Tata Lingkungan di Tingkat Lansekap dan Tapak; mengikuti Rapat Kerja Teknis Penguatan Kompetensi BPKHTL dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dengan Mendayagunakan Instrumen Tata Lingkungan; serta mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Regional Sumatera. Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 layanan.
- (2) Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL dalam mendukung tuisi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Output yang ingin dicapai dari kegiatan verifikasi lapangan adalah 1 dokumen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait jasa lingkungan hidup terkait dengan air dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan keakuratan hasil pemodelan penentu jasa lingkungan hidup terkait dengan air dengan kondisi riil di lapangan. Verifikasi lapangan dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabutan Karimun dan Kabupaten Lingga. Dengan demikian capaian kinerja adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 dokumen.
- (3) Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL Kegiatan dengan output terlaksananya fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XII sebanyak 1 layanan. Sebagai upaya untuk mendukung penguatan peran BPKHTL dalam menjalankan fungsi tata lingkungan dan fasilitasi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah XII melaksanakan peningkatan kapasiats SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan AMDAL serta kegiatan koordinasi ke instansi terkait

dalam rangka pengumpulan data dokumen lingkungan. Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 layanan.

2. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terdiri dari 2 komponen kegiatan yaitu :

- (1) Dukungan Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan dengan target kinerja 1 Provinsi, namun dalam pelaksanaannya dengan anggaran yang tersedia digunakan untuk fasilitasi masyarakat Penerima SK Biru Program TORA dari Kabupaten Natuna dalam acara puncak Festival “LIKE” (Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi EBT) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KLHK. Capaian kinerja pada kegiatan dukungan inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 Provinsi.
- (2) Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya merupakan target kegiatan Prioritas Nasional dalam rangka mencapai sasaran penetapan seluruh kawasan hutan dengan target kinerja 1.900 Km. Penetapan kawasan hutan dilaksanakan melalui penataan batas kawasan hutan dengan tahapan kegiatan : pembuatan trayek batas kawasan hutan, pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga dan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan.

Pada tahun 2023 untuk mencapai target kinerja panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya sepanjang 1.900 Km, BPKHTL Wilayah XII melaksanakan :

- a. Pembuatan trayek batas kawasan hutan pada 6 kabupaten/kota yaitu kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna;
- b. Pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sepanjang 1.885,44 Km dengan rincian :
 - Kota Tanjungpinang sepanjang 37,27 Km
 - Kabupaten Bintan sepanjang 510,86 Km
 - Kabupaten Karimun sepanjang 107,86 Km

- Kabupaten Lingga sepanjang 307,08 Km
 - Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 186,28 Km
 - Kabupaten Natuna 730,42 Km
- c. Pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan sepanjang 1.885,44 Km dengan rincian :
- Kota Tanjungpinang sepanjang 36,73 Km
 - Kabupaten Bintan sepanjang 516,01 Km
 - Kabupaten Karimun sepanjang 113,73 Km
 - Kabupaten Lingga sepanjang 304,30 Km
 - Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 186,67 Km
 - Kabupaten Natuna 728,01 Km
- d. Pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan HPK tidak produktif di Kabupaten Natuna sepanjang 33,70 Km

Dengan demikian panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya adalah sepanjang 1.919,14 Km, melalui pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di 6 Kabupaten/Kota sepanjang 1.885,44 Km dan kawasan hutan HPK tidak produktif di Kabupaten Natuna sepanjang 33,70 Km.

3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, kegiatan dengan 2 komponen :
- (1) Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional dengan output tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumber daya hutan. Inventarisasi sumber daya hutan melalui enumerasi TSP/PSP terealisasi sebanyak 2 Klaster di Kabupaten Natuna. Realisasi kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu 2 Klaster sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.
 - (2) Data dan informasi penutupan lahan dilaksanakan melalui penafsiran citra satelit resolusi sedang di Provinsi Kepulauan Riau untuk update data penutupan lahan tingkat nasional. Adapun komponen dari kegiatan ini mencakup pengecekan lapangan dalam rangka penafsiran citra satelit resolusi sedang yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna. Sasaran kegiatan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan memiliki target kinerja

sebanyak 1 Layanan (1 Provinsi Kepulauan Riau). Capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 1 layanan.

4. Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan sasaran kegiatan tersedia data dan informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan adalah 1 Badan Usaha. Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan memiliki capaian kinerja 100%. Sebanyak 1 Badan Usaha telah dilakukan verifikasi pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan an. PT. Mirasindo Perdana di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya : Layanan umum
Layanan umum merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal yang terdiri dari penyusunan dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantuan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 1 layanan. Untuk mendukung sasaran kegiatan meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PKTL, pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah XII melaksanakan pembangunan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, pengelolaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBK/WBBM) serta pembangunan Sistem Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Selain itu, dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan pendekatan penyerapan dan emisi karbon yang seimbang (carbon net sink) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 atau dikenal dengan Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung upaya-upaya mitigasi penurunan emisi GRK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Paris Agreement dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BPKHTL Wilayah XII melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Rencana Kerja melibatkan berbagai stakeholder dari Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terkait Provinsi Kepulauan Riau, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, akademisi, mitra pembangunan dan perusahaan dari sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta sektor usaha lainnya. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dalam beberapa rangkaian Focus Group Discussin (FGD) dan workshop dengan para pihak terkait. Tujuan dari penyusunan dokumen Renja ini adalah untuk (1) menjabarkan target Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink ke dalam detail rencana aksi penurunan GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, (2) menentukan penanggung jawab dari setiap rencana aksi penurunan emisi GRK, dan (3) menetapkan Rencana Operasional aksi penurunan emisi GRK provinsi, dan (4) merumuskan tahapan monitoring dan evaluasi terhadap detail rencana aksi penurunan emisi GRK.

6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya : Layanan perkantoran
Layanan perkantoran merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor tercapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 1 layanan.
7. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya : Layanan sarana internal merupakan bagian dari layanan sarana dan prasarana internal yang memiliki capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 83 Unit. Komponen kegiatan ini mencakup:
 - (1) Pengadaan peralatan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 42 Unit berupa GPS Mapping 17 unit; GPS Navigasi 14 unit; Laptop teknis 6 unit; dan PC administrasi teknis 2 unit;
 - (2) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 41 unit berupa peralatan internet 1 unit; Laptop administrasi keuangan 4 unit; Pc administrasi persuratan 1 unit; AC 2 PK sebanyak 3 unit, AC 1 PK sebanyak 5 unit; Printer A3 MFC 2 unit;; Printer A4 MFC 2 unit; scanner 2 unit; set meja rapat 1 unit; kursi kerja pimpinan 4 unit; dispenser 1 unit; lemari arsip 1 unit; laptop operator 3 unit; furniture tempat tidur single set 5 unit; furniture tempat tidur queen set 4 unit; mesin pemotong rumput 1 unit; dan peojector 1 unit.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi terhadap sisa anggaran kegiatan penataan batas kawasan hutan pada tahun 2023 BPKHTL melaksanakan :

- 1) Bimbingan Teknis Tata Lingkungan lingkup Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan peserta dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, KPMP di Provinsi Kepulauan Riau serta UPT KLHK di Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dasar-dasar AMDAL, penyusunan AMDAL dan SIG tingkat dasar.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan Renstra 2020-2024, perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap 5 (lima) kegiatan yaitu (1) pencegahan dampak lingkungan; (2) pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (3) inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; (4) rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perbandingan realisasi kinerja 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2020, 2021 dan 2022

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Renstra (2020-2024)	Capaian Kinerja Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1. Pencegahan Dampak Lingkungan							
1.	Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	3 Layanan	-	-	1 Layanan	1 Layanan
2.	Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	3 Layanan	-	-	1 Layanan	1 Layanan
2. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan							
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	13.296 Ha	-	1 Provinsi	-	1 Provinsi

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Renstra (2020-2024)	Capaian Kinerja Tahun			
				2020	2021	2022	2023
2.	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	2.940 Km	80 Km	285 Km	694,12 Km	1.919,14 Km
3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan							
	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	35 Klaster	6 Klaster	4 Klaster	5 Klaster	2 Klaster
	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	5 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
4. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan							
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	5 Badan Usaha	<i>Refocusing anggaran</i>	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PKTL							
	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PKTL	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL (81 Poin) 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (3 level) 3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel					
		Layanan umum	5 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan perkantoran	5 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan sarana dan prasarana internal	54 Unit	28 Unit	10 Unit	6 Unit	83 Unit

Sumber : Renstra BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024 (Perubahan) dan Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan)

Tabel 10 menyajikan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022. Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa capaian kinerja 4 kegiatan dari 5 kegiatan tercapai pada tiap tahunnya. Untuk kegiatan pencegahan dampak lingkungan baru dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XII mulai tahun 2022 sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Untuk kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dengan komponen kegiatan dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan

hutan di 7 kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XII pada tahun 2018. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada usulan objek TORA dalam kawasan hutan dari Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sedangkan pada tahun 2023 komponen pada kegiatan ini hanya berupa dukungan/fasilitasi masyarakat Penerima SK Biru Program TORA dari Kabupaten Natuna dalam acara puncak Festival “LIKE” (Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi EBT). Untuk kegiatan rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dengan komponen kegiatan verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan pada tahun 2020 dari semula ada menjadi tidak ada karena adanya perubahan postur dan rincian anggaran dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra BPKH Wilayah XII Tahun 2020-2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui capaian Renstra tersebut, dan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencermati perkiraan capaian pada akhir tahun 2024. Tabel 11 menunjukkan capaian kinerja pada tahun keempat pelaksanaan Renstra dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target Renstra 2020-2024.

Tabel 11. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Persentasenya terhadap Renstra BPKH Tahun 2020-2024

Komponen Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun					Target Renstra BPKH XII 2020-2024	% Capaian Terhadap Renstra
	2020	2021	2022	2023	s.d Tahun 2023		
Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	-	-	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	66,67
Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	-	-	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	66,67

Komponen Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun					Target Renstra BPKH XII 2020-2024	% Capaian Terhadap Renstra
	2020	2021	2022	2023	s.d Tahun 2023		
Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan	-	1 Provinsi 140,68 Ha	-	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi (13.296 Ha)	1,06
Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya	80 Km	285 Km	694,12 KM	1.919,14 Km	2.978,26 Km	2.940 Km	101,30
Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional	6 Klaster	4 Klaster	5 Klaster	2 Klaster	17 Klaster	35 Klaster	48,57
Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	80,00
Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	<i>Refocusing anggaran</i>	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	3 Badan Usaha	5 Badan Usaha	60,00
Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	80,00
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 layanan	1 layanan	1 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	80,00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28 Unit	10 Unit	6 Unit	83 Unit	127 Unit	54 Unit	235,18

Sumber : Renstra BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Capaian kinerja tertinggi pada tahun keempat pelaksanaan Renstra 2020-2024 terdapat pada komponen kegiatan layanan sarana internal sebesar 235,18% dimana sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 127 unit dari 54 unit target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024. Layanan sarana internal pada tahun 2023 berupa pengadaan perangkat pengolah data dan informasi sebanyak 42 unit; dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 41 unit merupakan kegiatan tambahan yang bersumber dari ABTN PNPB PKH untuk dukungan sarana teknis dan non teknis dalam rangka kegiatan Prioritas Nasional (penetapan seluruh kawasan hutan).

Capaian kinerja terendah terdapat pada komponen kegiatan inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan yaitu sebesar 1,06%, dimana dari target 13.296 Ha sampai dengan tahun 2023 baru terealisasi 140,68 Ha. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak ada usulan objek TORA dalam kawasan

hutan dari Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sehingga BPKHTL Wilayah XII tidak mengalokasikan kegiatan dan anggarannya dalam Renja.

Pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah XII memiliki beban anggaran dan kegiatan terbesar pada komponen kegiatan panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya yaitu sepanjang 1.900 Km. Sasaran kegiatan ini adalah terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang dipastikan telah tercapai sebelum tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 11 dimana target Renstra tahun 2020-2024 panjang batas kawasan hutan sepanjang 2.940 Km sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sepanjang 2.978,26 Km.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target DPKTL Tahun 2023

BPKHTL Wilayah XII dalam merencanakan kegiatan dan komponennya berpedoman pada Renstra dan Renja Ditjen PKTL. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus menyumbang keberhasilan pencapaian target Ditjen PKTL tahun 2020-2024. Tabel 12 memperlihatkan target Renja Ditjen PKTL dan capaian BPKHTL Wilayah XII dalam menyumbang pencapaian kinerja Ditjen PKTL.

Tabel 12. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Persentasenya terhadap Renja DPKTL Tahun 2023

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Renja BPKHTL Tahun 2023		Target Renja DPKTL 2023	% Capaian Renja DPKTL 2023
			Target	Capaian		
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan					
	1. Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,55
	2. Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	20 Dokumen	5,00
	3. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,55

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Renja BPKHTL Tahun 2023		Target Renja DPKTL 2023	% Capaian Renja DPKTL 2023
			Target	Capaian		
2.	Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan					
	1. Terelesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	1 Provinsi	1 Provinsi	24 Provinsi	4,17
	2. Terelesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	1.900 Km	1.919,14 Km	44.973,88 Km	4,27
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan					
	1. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	2 Klaster	2 Klaster	70 Klaster	2,86
	2. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,55
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	213 Badan Usaha	0,47
5.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit PKTL					
	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Layanan umum	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,35
	2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,35
	3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Layanan sarana dan prsarana internal	83 Unit	83 Unit	3.072 Unit	2,70

Sumber : Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan); Renja DPKTL Tahun 2023 (Perubahan)

Tabel 12 menunjukkan persentase capaian terbesar BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 terhadap Renja DPKTL tahun 2023 terdapat pada komponen kegiatan verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif yaitu sebesar 5,00%. BPKHTL Wilayah XII menyumbang 1 dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif dari 20 dokumen yang ditargetkan oleh Ditjen PKTL. Sedangkan capaian terendah terdapat pada komponen kegiatan hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebesar 0,47% dimana dari 213 Badan Usaha yang menjadi target Ditjen PKTL pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah XII hanya menyumbang 1 Badan Usaha.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan yang direncanakan untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat terlaksana dengan baik sehingga realisasi tercapai 100%. Kegiatan pencegahan dampak lingkungan terealisasi 100%, kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terealisasi 101,01%; kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan terealisasi 100%; kegiatan rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan tercapai 100%; dan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, termasuk layanan umum, layanan perkantoran, dan layanan sarana internal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit PKTL memiliki nilai capaian 100%.

A.6. Analisis Penggunaan atas Efisiensi Sumber Daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan. Berikut efisiensi penggunaan sumber daya atas masing-masing kegiatan sebagaimana tersaji dalam Tabel 13.

Tabel 13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan				
	1. Meningkatkan Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	100,00	99,85	0,15
	2. Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	100,00	99,96	0,04
	3. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	100,00	99,84	0,16

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.	Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan				
	1. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	100,00	100,00	0,00
	2. Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	101,01	100,00	(1,01)
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
	1. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	100,00	99,97	0,03
	2. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	100,00	100,00	0,00
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	100,00	99,85	0,15
5.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit PKTL				
	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Layanan umum	100,00	99,98	0,02
	2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Layanan perkantoran	100,00	99,47	0,53
	3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Layanan sarana dan prasarana internal	100,00	100,00	0,00

A.7. Analisis Unit Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Seluruh kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung tercapainya program kualitas lingkungan hidup; pengelolaan hutan berkelanjutan; dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen PKTL. Capaian kinerja kegiatan tersebut akan menyumbang capaian pada kegiatan pencegahan dampak lingkungan (Dit. PDLKWS dan Dit. PDLUK); Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (Dit. PPKH); kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan (Dit. IPSDH); kegiatan rencana dan penggunaan

kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan (Dit. RPPKHWP); dan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (SetDitjen PKTL). Tabel 14 menunjukkan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada tahun 2023.

Tabel 14. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Komponen Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Capaiam	Analisis Unit Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan
Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	Program DPKTL: Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan Es I : Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KRO : Pelayanan Publik Lainnya Hasil yang dicapai : Kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang kinerja DPKTL sebesar 4,55%. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XII sebanyak 1 layanan akan mendorong tercapainya sasaran program pada Ditjen PKTL meningkatkannya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan
Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	Program DPKTL: Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan Es I : Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KRO : Data dan Informasi Publik Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang kinerja DPKTL sebesar 5,00%. Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif sebanyak 1 dokumen akan mendorong tercapainya sasaran program pada Ditjen PKTL meningkatkannya meningkatkannya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan
Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	Program DPKTL: Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan Es I : Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan KRO : Pelayanan Publik Lainnya

Komponen Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Capaian	Analisis Unit Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan
				<p>Hasil yang dicapai : Kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang kinerja DPKTL sebesar 4,55%. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 layanan akan mendorong tercapainya sasaran program pada Ditjen PKTL meningkatkannya meningkatkan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan</p>
Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	1 Provinsi	1 Provinsi	<p>Program DPKTL: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kegiatan :Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KRO :Kebijakan Bidang Kehutanan</p> <p>Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang kinerja DPKTL sebesar 4,17%. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA sebanyak 1 Provinsi akan mendorong tercapainya sasaran program pada Ditjen PKTL terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA</p>
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	1.900 Km	1.900 Km	<p>Program DPKTL: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kegiatan :Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KRO :Kebijakan Bidang Kehutanan</p> <p>Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar sebesar 4,27%. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga sepanjang 1.919,14 Km akan mendorong tercapainya sasaran program Ditjen PKTL terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan sebagai hutan tetap</p>
Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	2 Klaster	2 Kalster	<p>Program DPKTL: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kegiatan :Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KRO :Data dan Informasi Publik</p> <p>Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar 2,86%. Tersedia dan</p>

Komponen Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Capaian	Analisis Unit Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan
				termutakhirnya data dan informasi SDH hasil Inventarisasi Hutan Nasional melalui enumerasi TSP/PSP sebanyak 2 Klaster akan mendorong tercapainya program Ditjen PKTL meningkatnya pelayanan data dan informasi SDH
Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi penutupan lahan nasional	1 Layanan	1 Layanan	<p>Program DPKTL: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p>KRO : Data dan Informasi Publik</p> <p>Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar 4,55%. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan melalui penafsiran citra satelit resolusi sedang di Provinsi Kepulauan Riau akan mendorong tercapainya program Ditjen PKTL meningkatnya pelayanan data dan informasi penutupan lahan nasional</p>
Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	<p>Program DPKTL: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p>KRO : Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha</p> <p>Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian BPKHTL sebesar 100,00% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar 0,47%. Tersedia data dan informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 1 Badan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau akan menunjang tercapainya sasaran kegiatan Ditjen PKTL meningkatnya seumbangan PNBP dari penggunaan kawasan hutan</p>
Layanan Umum	Terlaksananya layanan umum	1 Layanan	1 Layanan	<p>Program DPKTL: Dukungan Manajemen Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan</p> <p>KRO : Layanan dukungan manajemen internal</p> <p>Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar 4,35%. Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile,</p>

Komponen Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Capaiam	Analisis Unit Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan
				efektif dan efisien melalui penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, tersusunya laporan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan kerumahtanggan, pembangunan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015, pengelolaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta pembangunan Sistem Anti Penyuapan ISO 37001:2016; serta penyusunan dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kepulauan Riau akan mendorong meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen PKTL [SAKIP dengan poin 83]
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Program DPKTL: Dukungan Manajemen Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KRO : Layanan dukungan manajemen internal Hasil yang dicapai : Rincian Output ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar 4,35%. Terbayarnya gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran akan mendorong meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen PKTL [SAKIP dengan poin 83]
Layanan sarana dan prasarana internal		6 Unit	6 Unit	Program DPKTL: Dukungan Manajemen Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KRO : Layanan sarana dan prasarana internal Hasil yang dicapai : Rincian Ooutput ini telah menunjang capaian kinerja BPKHTL sebesar 100% dan menunjang capaian kinerja DPKTL sebesar 2,70%. Pengadaan peralatan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 42 Unit; dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 41 unit akan mendorong meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen PKTL [SAKIP dengan poin 83]

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung capaian kinerja kegiatan tahun 2023, BPKHTL Wilayah XII mendapat alokasi pagu anggaran sesuai dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran [DIPA] Nomor : 029.06.2 -439649/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 26.551.618.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Pada tahun 2023 DIPA BPKHTL Wilayah XII mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan perubahan program dan kegiatan, penambahan pagu anggaran PNPB PKH, distribusi dan pergeseran anggaran belanja antar satker, realokasi anggaran realokasi anggaran untuk kegiatan PN dan realokasi blokir *Automatic Adjustment* sehingga DIPA terakhir hasil revisi ke 14 tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 26.332.016.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah). Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 26.310.552.465,- (dua puluh enam milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,92%. Dalam hal penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai 100% namun realisasi atau target fisik tercapai 100% maka terdapat adanya penggunaan anggaran yang bersifat efisien, efektif dan ekonomis. Realisasi anggaran per kegiatan beserta komponennya berdasarkan perjanjian kinerja BPKHTL Wilayah XII dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA BPKHTL Wilayah XII Tahun Anggaran 2023

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Volume	Anggaran Tahun 2023		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan					
	1. Meningkatnya Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000	49.923.805	99,85
	2. Tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif	1 Dokumen	269.000.000	268.890.481	99,96
	3. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000	49.922.027	99,84

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Volume	Anggaran Tahun 2023		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan					
	1. Terelesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA	1 Provinsi	75.000.000	74.999.970	100,00
	2. Terelesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan Hak-Hak pihak ketiga	1.900 Km	17.332.033.000	17.331.345.151	100,00
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan					
	1. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	2 Klaster	145.605.000	145.556.811	99,97
	2. Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	97.298.000	97.295.170	100,00
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	80.000.000	79.878.035	99,85
5.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit PKTL					
	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Layanan umum	1 Layanan	1.073.900.000	1.073.687.981	99,98
	2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Layanan perkantoran	1 Layanan	5.260.380.000	5.240.286.034	99,47
	3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Layanan sarana dan prasarana internal	83 Unit	1.898.800.000	1.898.767.000	100,00
Jumlah Total				26.332.016.000	26.310.552.465	99,92

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) komponen kegiatan yang realisasi penyerapan anggaran mencapai 100,00 % yaitu (1) dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan; (2) panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya; (3) data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL; dan (4)

layanan sarana dan prasarana internal. Sedangkan realisasi anggaran yang paling rendah adalah komponen kegiatan layanan perkantoran 99,47% pada sub komponen pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak terserap maksimal.

Dengan meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tercapai sebesar 100%. Pencapaian masing-masing kegiatan tersebut yaitu (1) terlaksananya fasilitasi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH sebanyak 1 layanan; (2) tersedia data dan informasi verifikasi kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara pasrtisipatif sebanyak 1 dokumen; (3) terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH sebanyak 1 layanan; (4) dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan Berita Acara tata Batas Objek TORA sebanyak 1 Provinsi; (5) panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga sepanjang 1.900 Km; (6) tersedia dan termutakhirnya data dan informasi sumberdaya hutan melalui Inventarisasi Hutan Nasional sebanyak 2 Klaster; (7) tersedia dan termutakhirnya data dan informasi penutupan lahan untuk update data penutupan lahan tingkat nasional di 1 Provinsi Kepulauan Riau; (8) tersedia data dan informasi hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 1 Badan Usaha; (9) meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui layanan umum sebanyak 1 layanan; (10) meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui layanan perkantoran sebanyak 1 layanan serta; (11) terlaksananya layanan sarana dan prasarana internal sebanyak 83 unit.

IV. PENUTUP

Seluruh kegiatan dan komponen yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja antara BPKHTL wilayah XII dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 tercapai 100%. Capaian kinerja kegiatan tersebut akan menyumbang capaian pada unit Eselon II kegiatan pencegahan dampak lingkungan (Dit. PDLKWS dan Dit. PDLUK); Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (Dit. PPKH); kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan (Dit. IPSDH); kegiatan rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan (Dit. RPPKHWP); dan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (SetDitjen PKTL). Capaian kinerja tersebut juga akan menyumbang capaian program (Eselon I) antara lain program kualitas lingkungan hidup, program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen.

Sejalan dengan realisasi anggaran dan capaian RO BPKHTL Wilayah XII, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) memberikan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 sebesar 81,33 (baik). IKPA ini digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 3 (tiga) aspek yaitu : kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%). Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh BPKHTL Wilayah XII pada masa yang akan datang adalah meningkatkan pengawasan/monitoring terhadap penggunaan anggaran dan capaian kinerja sesuai dengan Renja dan Renstra Tahun 2020-2024, sehingga pada akhir tahun 2024 target Renstra tersebut tercapai.

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1	Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XII Tanjungpinang	4

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR : SK.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2023

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - b. Bahwa perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf a, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 724);

5. Peraturan...

5. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 Tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2023 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sampai hasil revisi anggaran terakhir, serta menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2023.
- KETIGA : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang serta Rencana Aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebagaimana lampiran II dan III.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,



TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR: SK.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2023

TANGGAL 10 JANUARI 2023

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Setiawan, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah XII Tanjung Pinang
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

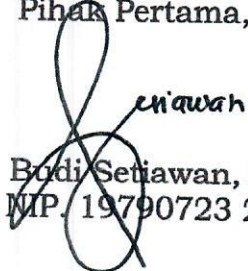
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,


Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Pihak Pertama,


Budi Setiawan, S.P., M.Si.
NIP. 19790723 200312 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KERJA : 439649. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	
5436.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL serta layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL serta layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	2 layanan
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL 3. Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Terlaksananya Layanan Umum	1 Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 369.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 19.028.307.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 172.903.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 6.981.408.000
Jumlah	Rp. 26.551.618.000
	Dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah
Blokir Anggaran sebesar	Rp. 11.064.806.000
	Sebelas miliar enam puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah

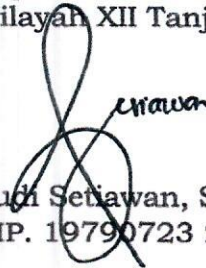
Jakarta, Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Kepala BPKHTL
Wilayah XII Tanjung Pinang,



Buch Setiawan, S.P., M.Si.
NIP. 19790723 200312 1 003

LAMPIRAN 2

Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023 (Perubahan I)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : SK. 28/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2023

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
(PERUBAHAN I)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2023 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Perubahan I);
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 724);
5. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 Tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2023 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN (PERUBAHAN I).

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sampai hasil revisi anggaran terakhir, serta menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2023.

KETIGA : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang serta Rencana Aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebagaimana lampiran II dan III.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIRKETUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,



TRİYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ
NIP. 19710321 199302 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR SK. 28/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2023

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN (PERUBAHAN I)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Setiawan, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tanjung Pinang
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

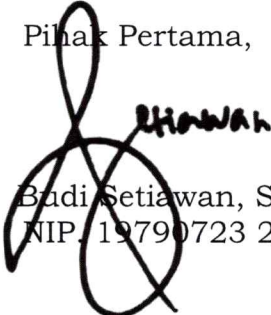
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,


Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Pihak Pertama,


Budi Setiawan, S.P., M.Si.
NIP. 19790723 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)
SATUAN KERJA : 439649. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	2		Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Unit
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	1.900	1.900	Km
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA	-	-	Provinsi

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH			
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	1	1	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik			
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1	1	Dokumen
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	2	2	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di	1	1	Layanan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Wilayah Kerja BPKHTL			
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	1	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	83	83	Unit
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	83	83	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp 29.103.307.000	Rp. 27.902.977.000
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp 242.903.000	Rp. 242.903.000
3. Rencana dan Pengawasan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp 80.000.000	Rp. 80.000.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp 369.000.000	Rp. 369.000.000
Program Dukungan Manajemen		
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp 9.379.108.000	Rp. 8.683.302.000
TOTAL ANGGARAN	Rp 39.174.318.000	Rp 37.278.182.000

Jakarta, September 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Kepala BPKHTL Wilayah XII
Tanjungpinang

Budi Setiawan, S.P., M.Si.
NIP. 19740723 200312 1 003

LAMPIRAN 3

Matriks Renstra BPKHTL Wilayah XII Tahun 2020-2024 (Perubahan

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024**

Kegiatan	Sasaran	Output	Komponen	Elemen	Target Kumulatif					Alokasi Anggaran Baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan actual	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Penataan batas kawasan hutan (reguler)	Penyiapan Trayek batas kawasan hutan	2 Kab	4 Kab	5 Kab	7 Kab	-	0,108	0,403	1,030	2,060	-
				Pemancangan Batas sementara Dan identifikasi hak-hak pihak Ketiga	80 km	365 km	1.059 km	2.940 km	-	1,218	2,422	4,121	6,936	-
				Pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan	80 km	365 km	1.059 km	2.940 km	-	1,233	2,830	3,743	5,729	-
Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	-	13.296 ha	-	-	-	-	2,400	-	-	-
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi potensi sumber daya hutan	Enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi PSP	6 klaster	10 klaster	15 klaster	17 klaster	35 klaster	0,683	1,323	1,927	2,772	3,553
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Cek lapangan data penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	0,109	0,218	0,327	0,436	0,545

Kegiatan	Sasaran	Output	Komponen	Elemen	Target Kumulatif					Alokasi Anggaran Baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Persiapan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	0,135	0,270	0,405	0,540	0,675
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Meningkatnya Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	1 layanan	2 layanan	3 layanan	-	-	0,017	0,067	0,1
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Meningkatnya Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	1 layanan	2 layanan	3 layanan	-	-	0,017	0,067	0,1
Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	layanan dukungan manajemen satker	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,238	0,433	0,734	1,099	1,521
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,067	0,132	0,283	0,339	0,419
			Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,150	0,349	0,633	0,821	1,012
			Pengelolaan kepegawaian	Pengelolaan kepegawaian	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,200	0,422	0,699	0,833	1,209
			Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,147	0,322	0,501	0,722	0,911
		Layanan perkantoran satker BPKH	Gaji dan tunjangan	Gaji dan tunjangan	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	3,339	6,728	9,989	12,762	15,888
			Operasional dan pemeliharaan kantor	Operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	1,229	2,433	3,632	4,855	6,099

LAMPIRAN 4

Matriks Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023

**MATRIK RENCANA KERJA (RENJA)
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TAHUN 2023**

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
Kualitas Lingkungan Hidup	K.1 Pencegahan Dampak Lingkungan SK.1 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan				369.000.000,00
		Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Terlaksananya penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	369.000.000,00
		Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional			369.000.000,00
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.2 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan SK.2 terselesaikanya seluruh kawasan hutan				19.028.307.000,00
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	19.028.307.000,00
		a. Pembuatan trayek batas			906.243.000,00
		b. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kota Tanjungpinang			220.398.00,00
		c. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Bintan			1.694.997.000
		d. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Karimun			528.832.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		e. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas			854.286.000,00
		f. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Lingga			1.145.458.000,00
		g. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Natuna			2.940.781.000,00
		h. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas			1.151.290.000,00
		i. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Natuna			4.092.646.000,00
		j. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Lingga			1.641.288.000,00
		k. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kota Tanjungpinang			307.854.000,00
		l. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Bintan			2.515.036.000,00
		m. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Karimun			740.532.000,00
		n. bimbingan pengawasan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif			288.675.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.3 SK.3	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan			172.903.000,00
		Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	75.605.000,00
		Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi TSP/PSP)			75.605.000,00
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	97.298.000,00
		Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			97.298.000
Dukungan Manajemen	K.4 SK.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi			6.891.408.000,00
		Layanan Umum	Layanan terlaksana umum	1 Layanan	575.000.000,00
		a. penyusunan program dan penyusunan rencana anggaran			155.005.000,00
		b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			11.487.000,00
		c. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan			63.395.000,00
		d. pengelolaan kepegawaian			76.083.000,00
		e. pelayanan umum rumah tangga dan perlengkapan			90.500.000,00
		f. pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015			119.730.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		g. penanganan dan pencegahan COVID-19			58.800.000,00
		Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	6.406.408.000,00
		a. Gaji dan tunjangan			5.079.508.000,00
		b. Operasional dan pemeliharaan kantor			1.326.900.000,00

LAMPIRAN 5

Matriks Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 (Perubahan)

**MATRIK RENCANA KERJA (RENJA)
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TAHUN 2023
(PERUBAHAN)**

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
Kualitas Lingkungan Hidup	K.1 Pencegahan Dampak Lingkungan SK.1 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan				369.000.000,00
		Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000,00
		Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	1 Dokumen	269.000.000,00
		Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000,00
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.2 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan SK.2 Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				17.407.033.000,00
		Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA	Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Provinsi	75.000.000,00
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.2 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan SK.3 Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan				17.332.033.000,00
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan	1.900 Km	17.332.033.000,00
		a. Pembuatan trayek batas			656.180.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		b. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kota Tanjungpinang			100.173.000,00
		c. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Bintan			1.163.201.000,00
		d. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Karimun			310.501.000,00
		e. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas			563.528.000,00
		f. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Lingga			721.676.000,00
		g. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Natuna			2.373.721.000,00
		h. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kota Tanjungpinang			152.382.000,00
		i. supervisi/bimbingan pengawasan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif			953.777.000,00
		j. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Anambas			999.081.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		k. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Natuna			3.844.127.000,00
		l. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Lingga			1.467.249.000,00
		m. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Karimun			608.986.000,00
		n. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Bintan			2.344.337.000,00
		o. Peningkatan kapasitas SDM BPKHTL Wilayah XII			506.699.000,00
		p. Pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif pelepasan HPK Tidak Produktif di Kabupaten Natuna			438.699.000,00
		q. Bimbingan Teknis Tata Lingkungan			321.220.000,00
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.3 SK.4	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan			242.903.000,00
		Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Klaster	145.605.000,00
		Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi TSP/PSP)			75.605.000,00
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	97.298.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			97.298.000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.4 SK.5	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Meningkatnya sumbangan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan			80.000.000,00
		Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	1 Unit	80.000.000,00
Dukungan Manajemen	K.5 SK.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			8.233.080.000,00
		Layanan Umum	Layanan terlaksana umum	1 Layanan	1.073.900.000,00
		a. penyusunan program dan penyusunan rencana anggaran			140.195000,00
		b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			26.960.000,00
		c. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan			77.726.000,00
		d. pengelolaan kepegawaian			106.768.000,00
		e. pelayanan umum rumah tangga dan perlengkapan			162.113.000,00
		f. pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015			108.946.000,00
		g. penyusunan Rencana Kerja Indonesia Forestry and Land Use (FOLU) Net Sink Sub Nasional Prov. Kepulauan Riau			300.000.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		h. pengelolaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WWBM			51.167.000,00
		i. pembangunan sistem anti penyuapan ISO 37001:2016			100.025.000,00
		Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	5.260.380.000,00
		a. Gaji dan tunjangan			3.699.131.000,00
		b. Operasional dan pemeliharaan kantor			1.561.249.000,00
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	83 Unit	1.898.800.000,00
		a. Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi			1.436.400.000,00
		b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			462.400.000,00



Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII
Jl. Ganet Km. 14 Tanjungpinang
Telp. 0771-7335242 Wa : 082289997767



bpkh12tanjungpinang@gmail.com



BPKH XII Tanjungpinang



[@bpkh12tanjungpinang](https://www.instagram.com/bpkh12tanjungpinang)